

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin dan H. Zainal, 2003, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Association for the Prevention of Torture dan Inter-American Institute of Human Rights dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010, *Protokol Opsional untuk Konyensi PBB Melawan Penyiksaan Pedoman Pelaksanaan (Revised Edition) teks Bahasa Indonesia*, Geneva: APT.

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, Minnesota: West Group.

Edward Peters, 1999, *Torture: Expanded Edition*, United States: University of Pennsylvania Press.

KontraS, 2015, *Laporan Kronik Penyiksaan 2014-2015: Mendelegitimasi Praktik Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta: KontraS.

KontraS, 2016, *Penyiksaan Merusak Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2016*, Jakarta: KontraS.

KontraS, 2017, *Penyiksaan Bukan Solusi Penegakan Hukum: Laporan Hari Anti Penyiksaan Sedunia 2017*, Jakarta, KontraS.

Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko, 2012, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan Partnership.

Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007, *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*, Jakarta: ELSAM.

Lene Wendland, 2002, *A Handbook on State Obligations under The UN Convention against Torture*, Geneva: Association for the Prevention of Torture.

Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

The Association for the Prevention of Torture and The Center for Justice and International Law, 2008, *Torture in International Law, a Guide to Jurisprudence*, Geneva: SRO-Kundig.

Zainal Abidin, 2017 *Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Jurnal atau Artikel:

Ben Golder dan George Williams, “*What Is ‘Terrorism’? Problems of Legal Definition*”, UNSW Law Journal, Vol. 27 No. 2, 2004.

M. Cherif Bassiouni, 1996, “*International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*”, Duke Law Journal: Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4.

Pranoto Iskandar, 2011, *Tindak Penyiksaan dan Hukum Internasional*, Jurnal Pandecta, Vol. 6, Nomor 2, Juli.

Dokumen Lainnya:

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM, PP Muhammadiyah dan KontraS dengan agenda acara “Meminta penjelasan dan masukan terkait meninggalnya Sdr. Siyono”, 12 April 2016.

Laporan Situasi Penyiksaan di Indonesia Juni 2012- Juli 2013 oleh KontraS, 2013.

Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, *Komite Menentang Penyiksaan Lembar Fakta No. 17*, Yogyakarta: PUSHAM-UII.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), 2010, *Metode-metode Penyiksaan Lembar Fakta No. 4 (Revisi I)*, Yogyakarta: Pusham-UII.

The Working Group on The Advocacy against Torture, 2010, *Alternative Follow Up Report on the Progress of the Implemetation of the Recommendations Made by the Committee against Torture to Indonesia*, Jakarta: WGAT.

United Nations, 2006, *Laporan Khusus PBB tentang Penyiksaan*, UN Doc. A/61/259, 14 Agustus 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 tahun 2001 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perjanjian Internasional:

Universal Declaration of Human Rights, 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984.

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2002.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

Website:



BBC News, “DPR Sahkan Revisi UU Terorisme, Perppu Tak Lagi Diperlukan”,
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953>, diakses pada 29 Agustus 2018 pukul 22.53 WIB.

Elba Damhuri, “Menguak Misteri Kematian Jefri, Terduga Teroris Asal Lampung”,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/02/16/p47ili440-menguak-misteri-kematian-jefri-terduga-teroris-asal-lampung>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 12.26 WIB.

Damanhuri Zuhri, “Kasus Siyono Pintu Masuk Perbaiki Penanganan Terorisme”,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/07/o59i0e301-kasus-siyono-pintu-masuk-perbaiki-penanganan-terorisme>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 20.38 WIB.

Human Rights Watch, “The Legal Prohibition Against Torture”,
<https://www.hrw.org/news/2003/03/11/legal-prohibition-against-torture>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 22.21 WIB.

United Nations, “Torture, Instrument of Terror, Can Never be Used to Fight Terror, Secretary-General Says In Message for Human Rights Day”,
<http://www.un.org/press/en/2005/sgsm10257.doc.htm>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 21.48 WIB.

